



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARYO**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **416916**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **1.855.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 784 m2/216 m2 di KAB / KOTA BATANG, WARISAN Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1050 m2/380.2 m2 di KAB / KOTA BATANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **103.000.000**

1. MOTOR, SOLO YAMAHA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SPM SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **93.484.383**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.051.484.383**

III. HUTANG Rp. **65.277.225**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.986.207.158**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.